

LAPORAN INTERIM PENILAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT TRIWULAN IV 2022



PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Penilaian Kinerja Interim Pengadilan Negeri Tanah Grogot disusun untuk memonitoring pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam melaksanakan target yang tetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Melalui penyusunan laporan ini perkembangan kinerja dengan target target yang telah ditetapkan dapat terukur dan jika ada kendala dalam pelaksanaanya dapat dianalisis untuk dilakukan tindak lanjut yang tepat.

Dasar Hukum Penyusunan Laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Laporan ini menggambarkan pengukuran kinerja yang bertolak pada Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2022 sebagai jelmaan dari visi misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Seyogyanya banyak target pada indikator kinerja utama/ perjanjian kinerja yang hanya dapat diukur pada akhir tahun, karena terkait dengan pelaksanaan survey dan statistik, namun upaya-upaya untuk mencapai kinerja tersebut sesungguhnya dilaksanakan secara berkesinambungan sejak triwulan pertama berjalan, sehingga Laporan ini relevan disusun dan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menemukan permasalahan terkait pencapaian kinerja untuk ditindaklanjuti dengan tepat.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi harus menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi serta hubungan wewenang pelaporan.

Organisasi Mahkamah Agung RI didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

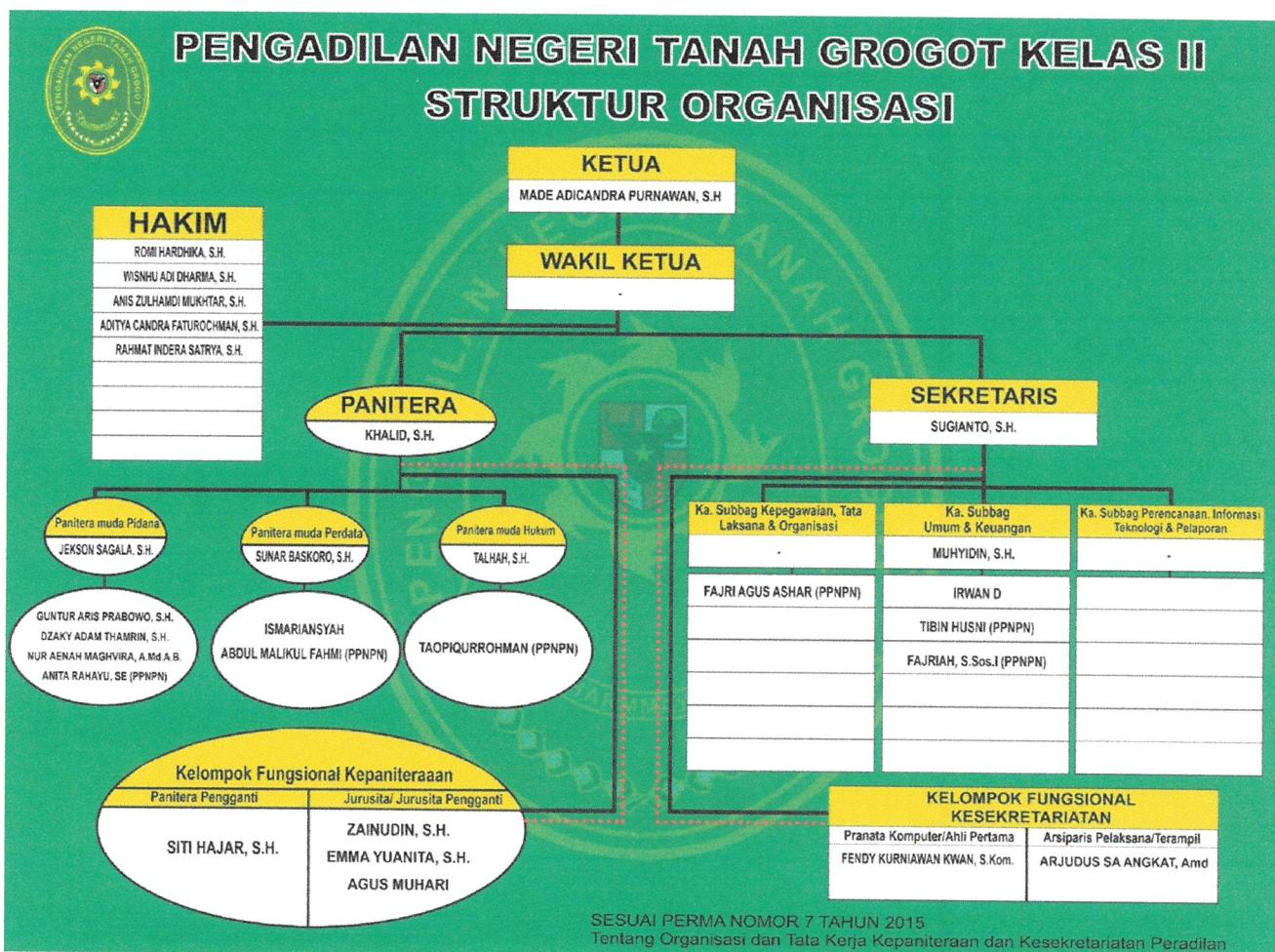
1. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
2. Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI
6. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Pada dasarnya tugas pokok dan fungsi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi di bidang teknis yudisial
2. Menyelenggarakan administrasi di bidang non teknis yudisial (administrasi umum)

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan sebagaimana tergambar dalam lampiran laporan ini, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut :



C. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Visi Pengadilan Negeri Tanah Grogot mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT YANG AGUNG"

Visi Pengadilan Negeri Tanah Grogot di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Dalam cetak biru yang telah disusun oleh Mahkamah Agung dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung termasuk salah satunya adalah Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Pengadilan Tanah Grogot yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Dalam rangka pencapaian visi, Pengadilan Negeri Tanah Grogot juga memperbaharui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik. Misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanah Grogot
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan “**Terwujudnya Pengadilan Tanah Grogot yang Agung**” adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional).¹² Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada pencari keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan MA dan badan peradilan dibawahnya dalam hal ini, Pengadilan Negeri Tanah Grogot mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang

adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain.

Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh MA dan Badan Peradilan dibawahnya dalam hal ini termasuk Pengadilan Negeri Tanah Grogot, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial).

Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, MA dan badan peradilan dibawahnya dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanah Grogot, menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengembang kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan

mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot menetapkan 4 sasaran strategis yang mencakup 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun rincian IKU tersebut diuraikan sebagai berikut :

No	Sasaran	No.	Indikator Kinerja
Misi 1 : Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanah Grogot			
1	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
Misi 2 : Memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada pencari keadilan			
2	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
		2	Persentase Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu
		3	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
		4	Persentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu
		5	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		6	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		7	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
		8	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan
Misi 3 : Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot			

3	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
		4	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
		5	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Misi 4 : Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanah Grogot

4	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
		2	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
		3	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan, melalui target-target yang diperjanjikan maka akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan pada tahun tersebut. Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas, sehingga kinerja yang diperjanjikan pada tahun tersebut bias dijadikan prioritas untuk mendapatkan pembiayaan dan menjadi fokus prioritas dalam pencapaian kinerja.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot menjadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam menetapkan sasaran pada Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2022. Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) Perjanjian Kinerja selaras dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2020-2024, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022, dan dokumen Anggaran

Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022. Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
		Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan	85
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90

D. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Interim Penilaian Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dalam dokumen Laporan Interim Penilaian Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Visi dan Misi
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Penulisan

BAB II Pengukuran Kinerja

BAB III Perkembangan Hasil Pelaksanaan Tugas

BAB IV Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

BAB II

PENGUKURAN KINERJA

A. Pengukuran Kinerja berdasarkan IKU dan Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja sebagai dasar evaluasi capaian kinerja mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagai Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Indikator yang ditetapkan berorientasi pada hasil dampak / Outcome dan benefit, bukan pada output sehingga pada umumnya Indikator tersebut dapat diukur secara valid pada akhir tahun berjalan, namun pada beberapa indikator yang dapat terukur sesuai dengan kondisi pada Triwulan IV kami tampilkan pada pencapaian Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	92	92	-
		Persentase Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	0	0	Pengadilan tidak menangani perkara perdata khusus
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	-
		Persentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	-
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	97,54	121,93	-
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	97,85	122,31	-

		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	0	0	Perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan sulit diselesaikan dengan diversi.
		Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan	85	99	116,47	-
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	-
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	0	0	Pengadilan tidak menangani perkara perdata khusus
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	-
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	-
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	0	0	Perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan sulit untuk

						diselesaikan melalui mediasi
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0	0	Tidak ada anggaran untuk melaksanakan kegiatan prodeo.
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	0	0	Tidak ada anggaran untuk melaksanakan kegiatan persidangan di luar gedung Pengadilan.
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	-
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90	100	111	-

BAB III

PERKEMBANGAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai acuan dalam menyusun perkembangan kinerja dalam laporan ini memiliki 4 sasaran dengan 17 indikator, sebagaimana di jelaskan pada bab sebelumnya bahwa sebagian besar indikator yang berorientasi pada hasil/dampak dapat secara valid diukur pada akhir tahun, namun seyogyanya upaya tersebut telah dilaksanakan sejak awal tahun dalam setiap sasaran pada IKU adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator 1 : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
Indikator 2 : Persentase Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu
Indikator 3 : Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
Indikator 4 : Persentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu
Indikator 5 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Indikator 6 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Indikator 7 : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
Indikator 8 : Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- Penyelesaian sisa perkara
- Penyelesaian perkara yang tepat waktu
- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
- Penyelesaian perkara pidana anak dengan diversi
- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Persentase penyelesaian perkara ditetapkan menjadi indikator untuk sebagai alat ukur rasio penyelesaian perkara yang diterima oleh Pengadilan. Sampai pada triwulan IV 2022, rata – rata penyelesaian perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot mencapai 100%. Untuk penyelesaian perkara anak dengan diversi masih mengalami kesulitan dikarenakan pihak yang terlibat di perkara lebih memilih untuk tetap melanjutkan perkara sampai ke persidangan. Kemudian tingkat ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan dapat diliat melalui seberapa banyak perkara yang telah diputus tidak mengajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator 1 : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator 2 : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator 3 : Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator 4 : Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator 5 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- Isi putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu
- Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Pengiriman salinan putusan merupakan indikator yang diukur agar dapat menilai perwujudan dari penyelesaian perkara yang efektif. Untuk penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi masih cukup sulit, dikarenakan para pihak baik penggugat maupun tergugat enggan untuk memilih berdamai sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator 1 : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator 2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator 3 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- Perkara Prodeo yang diselesaikan.
- Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
- Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Pembebasan biaya perkara, Sidang di luar gedung pengadilan dan layanan bantuan hukum merupakan salah satu upaya Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Tingkat Pertama dalam penguatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Untuk prodeo dan sidang di luar gedung pengadilan masih belum dapat dilakukan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot dikarenakan belum tersedianya anggaran untuk melaksanakan kedua kegiatan tersebut. Sedangkan Untuk layanan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah berjalan dengan baik.

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Indikator 1 : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)

Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (non executable). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami conflict of interest karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi ganguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 400302 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Hal 1 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	4,118,567,000	0	3,758,904,169	349,728,282	4,108,632,451	99.76 %	9,934,549
WA Program Dukungan Manajemen	4,118,567,000	0	3,758,904,169	349,728,282	4,108,632,451	99.76 %	9,934,549
WA.1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4,031,567,000	0	3,672,109,528	349,728,282	4,021,837,810	99.76 %	9,729,190
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,031,567,000	0	3,672,109,528	349,728,282	4,021,837,810	99.76 %	9,729,190
EBA 962 Layanan Umum	2,635,000	0	2,635,000	0	2,635,000	100.00	0
051 Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	2,635,000	0	2,635,000	0	2,635,000	100.00	0
051.0A PENANGANAN COVID-19 NON OPS	2,635,000	0	2,635,000	0	2,635,000	100.00	0
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,635,000	0	2,635,000	0	2,635,000	100.00	0
000079. Pengadaan Swab Anti gen / PCR	2,635,000	0	2,635,000	0	2,635,000	100.00	0
EBA.994 Layanan Perkantoran	4,028,932,000	0	3,669,474,528	349,728,282	4,019,202,610	99.76 %	9,729,190
001 Gaji dan Tunjangan	2,872,251,000	0	2,655,245,834	208,159,382	2,863,405,216	99.69 %	8,845,784
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	2,872,251,000	0	2,655,245,834	208,159,382	2,863,405,216	99.69 %	8,845,784
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	1,094,649,000	0	1,018,167,320	76,102,380	1,094,269,700	99.97 %	379,300
000001. Belanja Gaji Pokok PNS	944,353,000	0	867,961,920	76,102,380	944,064,300	99.97 %	288,700
000002. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	78,298,000	0	78,239,140	0	78,239,140	99.92 %	58,860
000003. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	71,998,000	0	71,966,260	0	71,966,260	99.96 %	31,740
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	21,000	0	17,573	1,361	18,934	90.16 %	2,066
000004. Belanja Pembulatan Gaji PNS	17,000	0	14,809	1,361	16,170	95.12 %	830
000005. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	2,000	0	1,436	0	1,436	71.80 %	564
000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	2,000	0	1,328	0	1,328	66.40 %	672
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	65,172,000	0	59,639,590	4,541,100	64,180,690	98.48 %	991,310
000007. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	55,712,000	0	50,697,410	4,541,100	55,238,510	99.15 %	473,490
000008. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	4,730,000	0	4,486,310	0	4,486,310	94.85 %	243,690
000009. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	4,730,000	0	4,455,870	0	4,455,870	94.20 %	274,130
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	22,420,000	0	20,648,602	1,571,898	22,220,500	99.11 %	199,500

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 *SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 400302 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Hal 2 dari 6

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000010. Belanja Tunj.Anak PNS	19,212,000	0	17,564,486	1,571,898	19,136,384	99.61 %	75,616
	000011. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1,604,000	0	1,544,914	0	1,544,914	96.32 %	59,086
	000012. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1,604,000	0	1,539,202	0	1,539,202	95.96 %	64,798
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	16,480,000	0	15,350,000	1,030,000	16,380,000	99.39 %	100,000
	000013. Belanja Tunjangan Struktural PNS	14,340,000	0	13,290,000	1,030,000	14,320,000	99.86 %	20,000
	000014. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1,070,000	0	1,030,000	0	1,030,000	96.26 %	40,000
	000015. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1,070,000	0	1,030,000	0	1,030,000	96.26 %	40,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,140,480,000	0	1,057,985,000	82,425,000	1,140,410,000	99.99 %	70,000
	000016. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	319,450,000	0	319,440,000	0	319,440,000	100.00	10,000
	000017. Belanja Tunjangan Fungsional PNS	739,135,000	0	656,710,000	82,425,000	739,135,000	100.00	0
	000018. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	81,895,000	0	81,835,000	0	81,835,000	99.93 %	60,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	127,690,000	0	124,396,369	3,159,863	127,556,232	99.90 %	133,768
	000019. Belanja Tunjangan PPh PNS	88,210,000	0	84,960,677	3,159,863	88,120,540	99.90 %	89,460
	000020. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	22,790,000	0	22,768,746	0	22,768,746	99.91 %	21,254
	000021. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	16,690,000	0	16,666,946	0	16,666,946	99.86 %	23,054
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	63,658,000	0	57,139,380	4,272,780	61,412,160	96.47 %	2,245,840
	000022. Belanja Tunj Beras PNS	63,658,000	0	57,139,380	4,272,780	61,412,160	96.47 %	2,245,840
511129	Belanja Uang Makan PNS	211,675,000	0	184,857,000	24,695,000	209,552,000	99.00 %	2,123,000
	000023. Belanja Uang Makan PNS	211,675,000	0	184,857,000	24,695,000	209,552,000	99.00 %	2,123,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	16,606,000	0	13,095,000	910,000	14,005,000	84.34 %	2,601,000
	000024. Belanja Tunjangan Umum PNS	14,280,000	0	11,095,000	910,000	12,005,000	84.07 %	2,275,000
	000025. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1,285,000	0	1,275,000	0	1,275,000	99.22 %	10,000
	000026. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1,041,000	0	725,000	0	725,000	69.64 %	316,000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	113,400,000	0	103,950,000	9,450,000	113,400,000	100.00	0
	000027. Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim Karir	113,400,000	0	103,950,000	9,450,000	113,400,000	100.00	0
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,156,681,000	0	1,014,228,694	141,568,900	1,155,797,594	99.92 %	883,406

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 *SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 400302 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Hal 3 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.0A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	369,775,000	0	320,028,420	49,695,301	369,723,721	99.99 %	51,279
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	284,258,000	0	240,626,301	43,596,501	284,222,802	99.99 %	35,198
000028. Langganan Koran dan Air Minum	11,362,000	0	9,714,301	1,612,501	11,326,802	99.69 %	35,198
000029. THR Pramubakti	6,560,000	0	6,560,000	0	6,560,000	100.00	0
000030. THR Satpam	7,216,000	0	7,216,000	0	7,216,000	100.00	0
000031. THR Pengemudi / Driver	7,216,000	0	7,216,000	0	7,216,000	100.00	0
000032. Satpam	86,592,000	0	72,160,000	14,432,000	86,592,000	100.00	0
000033. Pengemudi / Driver	86,592,000	0	72,160,000	14,432,000	86,592,000	100.00	0
000034. Pramubakti	78,720,000	0	65,600,000	13,120,000	78,720,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	22,216,000	0	21,856,119	355,000	22,211,119	99.98 %	4,881
000035. Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya	22,216,000	0	21,856,119	355,000	22,211,119	99.98 %	4,881
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	63,301,000	0	57,546,000	5,743,800	63,289,800	99.98 %	11,200
000036. Keperluan Sehari-hari Perkantoran / ATK	63,301,000	0	57,546,000	5,743,800	63,289,800	99.98 %	11,200
002.0B LANGGANAN DAYA DAN JASA	284,091,000	0	256,222,892	27,859,856	284,082,748	100.00	8,252
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	181,380,000	0	165,667,145	15,706,500	181,373,645	100.00	6,355
000037. Lisensi Video Conference	2,700,000	0	2,695,000	0	2,695,000	99.81 %	5,000
000038. Langganan Internet / Astinet	178,680,000	0	162,972,145	15,706,500	178,678,645	100.00	1,355
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10,650,000	0	9,325,300	1,324,500	10,649,800	100.00	200
000039. Biaya Pengiriman Surat	10,650,000	0	9,325,300	1,324,500	10,649,800	100.00	200
522111 Belanja Langganan Listrik	85,191,000	0	76,329,352	8,861,152	85,190,504	100.00	496
000040. Langganan Listrik	85,191,000	0	76,329,352	8,861,152	85,190,504	100.00	496
522112 Belanja Langganan Telepon	1,058,000	0	839,546	217,464	1,057,010	99.91 %	990
000041. Langganan Telepon	1,058,000	0	839,546	217,464	1,057,010	99.91 %	990
522113 Belanja Langganan Air	3,957,000	0	3,106,549	850,240	3,956,789	99.99 %	211
000042. Langganan Air	3,957,000	0	3,106,549	850,240	3,956,789	99.99 %	211
522141 Belanja Sewa	1,855,000	0	955,000	900,000	1,855,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 400302 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Hal 4 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000043. Langganan Web Hosting	1,855,000	0	955,000	900,000	1,855,000	100.00	0
002.0C PEMELIHARAAN KANTOR	354,546,000	0	308,450,777	45,626,653	354,077,430	99.87 %	468,570
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	203,112,000	0	174,892,146	28,124,954	203,017,100	99.95 %	94,900
000044. Pemeliharaan Gedung Kantor	190,687,000	0	169,252,055	21,359,954	190,612,009	99.96 %	74,991
000045. Pemeliharaan Halaman	12,425,000	0	5,640,091	6,785,000	12,405,091	99.84 %	19,909
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	52,380,000	0	51,620,300	719,727	52,340,027	99.92 %	39,973
000046. Pemeliharaan Rumah Dinas (7 UNIT)	52,380,000	0	51,620,300	719,727	52,340,027	99.92 %	39,973
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99,054,000	0	81,938,331	16,781,972	98,720,303	99.66 %	333,697
000047. Bahan Bakar Genset	1,600,000	0	1,595,070	0	1,595,070	99.69 %	4,930
000048. Inventaris Kantor	2,320,000	0	1,245,000	1,007,272	2,252,272	97.08 %	67,728
000049. Pemeliharaan Printer	9,000,000	0	4,006,000	4,875,000	8,881,000	98.68 %	119,000
000050. Pemeliharaan PC dan Notebook	12,450,000	0	9,614,000	2,820,000	12,434,000	99.87 %	16,000
000051. Pemeliharaan AC Split	12,000,000	0	8,051,727	3,942,700	11,994,427	99.95 %	5,573
000052. Pemeliharaan Genset	5,000,000	0	4,986,727	0	4,986,727	99.73 %	13,273
000053. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	48,734,000	0	46,720,277	1,938,000	48,658,277	99.84 %	75,723
000054. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	7,950,000	0	5,719,530	2,199,000	7,918,530	99.60 %	31,470
002.0D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	55,800,000	0	49,200,000	6,600,000	55,800,000	100.00	0
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	16,200,000	0	16,200,000	0	16,200,000	100.00	0
000055. Pengadaan Pakaian Dinas CPNS	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	100.00	0
000056. Pengadaan Pakaian Kerja PPNP	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
000057. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim	11,200,000	0	11,200,000	0	11,200,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	39,600,000	0	33,000,000	6,600,000	39,600,000	100.00	0
000058. Honor Pengelola PNBP	3,600,000	0	3,000,000	600,000	3,600,000	100.00	0
000059. Honor Kuasa Pengguna Anggaran	9,000,000	0	7,500,000	1,500,000	9,000,000	100.00	0
000060. Honor PPSPM	7,800,000	0	6,500,000	1,300,000	7,800,000	100.00	0
000061. Honor Bendahara Pengeluaran	7,200,000	0	6,000,000	1,200,000	7,200,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 *SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 400302 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Hal 5 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000062. Honor Pengelola Keuangan (Operator SIMAK BMN dan SAIBA)	12,000,000	0	10,000,000	2,000,000	12,000,000	100.00	0
002.0E PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN	1,550,000	0	1,350,000	200,000	1,550,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000	100.00	0
000063. Belanja Bahan Spanduk / Dokumentasi	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
000064. Snack / Kudapan	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	400,000	0	200,000	200,000	400,000	100.00	0
000065. Jasa Rohaniawan	400,000	0	200,000	200,000	400,000	100.00	0
002.0F RAPAT KOORDINASI INTERNAL	4,764,000	0	4,632,564	0	4,632,564	97.24 %	131,436
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	4,764,000	0	4,632,564	0	4,632,564	97.24 %	131,436
000066. Belanja Bahan	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000067. Snack / Kudapan	4,464,000	0	4,332,564	0	4,332,564	97.06 %	131,436
002.0G KONSULTASI TINGKAT BANDING	31,540,000	0	31,396,894	0	31,396,894	99.55 %	143,106
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	180,000	0	180,000	0	180,000	100.00	0
000068. Biaya Rapid Test / Swab Antigen	180,000	0	180,000	0	180,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,360,000	0	31,216,894	0	31,216,894	99.54 %	143,106
000069. Penginapan	8,800,000	0	8,709,094	0	8,709,094	98.97 %	90,906
000070. Uang Harian	13,760,000	0	13,760,000	0	13,760,000	100.00	0
000071. Transportasi Riil	8,800,000	0	8,747,800	0	8,747,800	99.41 %	52,200
002.0H KONSULTASI KE KPPN DAN KPKNL	22,970,000	0	16,021,647	6,888,000	22,909,647	99.74 %	60,353
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	50,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000
000072. Biaya Rapid Test / Swab Antigen	50,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,920,000	0	16,021,647	6,888,000	22,909,647	99.95 %	10,353
000073. Penginapan	3,140,000	0	2,311,647	818,000	3,129,647	99.67 %	10,353
000074. Uang Harian	11,180,000	0	7,810,000	3,370,000	11,180,000	100.00	0
000075. Transportasi Riil	8,600,000	0	5,900,000	2,700,000	8,600,000	100.00	0
002.0I PENANGGANAN COVID 19	14,365,000	0	9,645,500	4,699,090	14,344,590	99.86 %	20,410

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 *SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 400302 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Hal 6 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 000076. Pengadaan Masker, Hand Sanitizer, Vitamin dan Penambah Daya Tahan Tubuh	13,800,000	0	9,345,500	4,440,000	13,785,500	99.89 %	14,500
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 000077. Penyemprotan Disinfektan	565,000	0	300,000	259,090	559,090	98.95 %	5,910
002.0J HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM	17,280,000	0	17,280,000	0	17,280,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa 000078. Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim	17,280,000	0	17,280,000	0	17,280,000	100.00	0
WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	87,000,000	0	86,794,641	0	86,794,641	99.76 %	205,359
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	87,000,000	0	86,794,641	0	86,794,641	99.76 %	205,359
EBB.951 Layanan Sarana Internal	57,000,000	0	56,825,000	0	56,825,000	99.69 %	175,000
052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	37,000,000	0	36,850,000	0	36,850,000	99.59 %	150,000
052.0A Pengadaan Alat Pengolah Data	37,000,000	0	36,850,000	0	36,850,000	99.59 %	150,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 000081. PC Kepaniteraan	37,000,000	0	36,850,000	0	36,850,000	99.59 %	150,000
000082. Printer	27,000,000	0	26,950,000	0	26,950,000	99.81 %	50,000
000083. Pengadaan sarana Disabilitas Pengadilan	10,000,000	0	9,900,000	0	9,900,000	99.00 %	100,000
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	20,000,000	0	19,975,000	0	19,975,000	99.88 %	25,000
053.0A Pengadaan sarana Disabilitas Pengadilan	20,000,000	0	19,975,000	0	19,975,000	99.88 %	25,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 000083. Pengadaan sarana Disabilitas Pengadilan	20,000,000	0	19,975,000	0	19,975,000	99.88 %	25,000
EBB.971 Layanan Prasarana Internal	20,000,000	0	19,975,000	0	19,975,000	99.88 %	25,000
051 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	30,000,000	0	29,969,641	0	29,969,641	99.90 %	30,359
051.0A Pengadaan Prasarana Disabilitas Pengadilan	30,000,000	0	29,969,641	0	29,969,641	99.90 %	30,359
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 000080. Pengadaan Prasarana Disabilitas Pengadilan	30,000,000	0	29,969,641	0	29,969,641	99.90 %	30,359
	30,000,000	0	29,969,641	0	29,969,641	99.90 %	30,359

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 Satuan Kerja : 400303 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Hal 1 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	42,296,000	0	38,845,460	3,425,000	42,270,460	99.94 %	25,540
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	42,296,000	0	38,845,460	3,425,000	42,270,460	99.94 %	25,540
BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	42,296,000	0	38,845,460	3,425,000	42,270,460	99.94 %	25,540
AEA Koordinasi	1,500,000	0	450,000	1,050,000	1,500,000	100.00	0
AEA.001 Percepatan Penyelesaian Perkara	1,500,000	0	450,000	1,050,000	1,500,000	100.00	0
052 Dukungan Penyelesaian Perkara	1,500,000	0	450,000	1,050,000	1,500,000	100.00	0
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,500,000	0	450,000	1,050,000	1,500,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,500,000	0	450,000	1,050,000	1,500,000	100.00	0
000001. Kimwasmat	1,500,000	0	450,000	1,050,000	1,500,000	100.00	0
BCA Perkara Hukum Perseorangan	16,796,000	0	15,995,460	775,000	16,770,460	99.85 %	25,540
BCA.U08 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	16,796,000	0	15,995,460	775,000	16,770,460	99.85 %	25,540
051 Pendaftaran Berkas Perkara	9,705,000	0	9,693,000	0	9,693,000	99.88 %	12,000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	9,705,000	0	9,693,000	0	9,693,000	99.88 %	12,000
521211 Belanja Bahan	2,060,000	0	2,060,000	0	2,060,000	100.00	0
000002. Penggandaan dan penjilidan berkas perkara	2,060,000	0	2,060,000	0	2,060,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7,645,000	0	7,633,000	0	7,633,000	99.84 %	12,000
000003. Alat Tulis Kantor	7,645,000	0	7,633,000	0	7,633,000	99.84 %	12,000
053 Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.	2,760,000	0	2,351,960	400,000	2,751,960	99.71 %	8,040
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	2,760,000	0	2,351,960	400,000	2,751,960	99.71 %	8,040
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	260,000	0	251,960	0	251,960	96.91 %	8,040
000005. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	260,000	0	251,960	0	251,960	96.91 %	8,040
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,500,000	0	2,100,000	400,000	2,500,000	100.00	0
000006. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	2,500,000	0	2,100,000	400,000	2,500,000	100.00	0
055 Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa	2,715,000	0	2,363,000	350,000	2,713,000	99.93 %	2,000
055.0A TANPA SUB KOMPONEN	2,715,000	0	2,363,000	350,000	2,713,000	99.93 %	2,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 *SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 Satuan Kerja : 400303 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Hal 2 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Inti	s.d. Periode	%	
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15,000	0	13,000	0	13,000	86.67 %	2,000
000009. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	15,000	0	13,000	0	13,000	86.67 %	2,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,700,000	0	2,350,000	350,000	2,700,000	100.00	0
000010. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	2,700,000	0	2,350,000	350,000	2,700,000	100.00	0
056 Minutasi/Upaya hukum	645,000	0	620,000	25,000	645,000	100.00	0
056.0A TANPA SUB KOMPONEN	645,000	0	620,000	25,000	645,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	645,000	0	620,000	25,000	645,000	100.00	0
000011. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	645,000	0	620,000	25,000	645,000	100.00	0
057 Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	521,000	0	519,500	0	519,500	99.71 %	1,500
057.0A TANPA SUB KOMPONEN	521,000	0	519,500	0	519,500	99.71 %	1,500
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	21,000	0	19,500	0	19,500	92.86 %	1,500
000012. Pengiriman Salinan Putusan	21,000	0	19,500	0	19,500	92.86 %	1,500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00	0
000013. Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	250,000	0	250,000	0	250,000	100.00	0
000014. Pemberitahuan Putusan Banding	250,000	0	250,000	0	250,000	100.00	0
058 Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	450,000	0	448,000	0	448,000	99.56 %	2,000
058.0A TANPA SUB KOMPONEN	450,000	0	448,000	0	448,000	99.56 %	2,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	100,000	0	98,000	0	98,000	98.00 %	2,000
000015. Pengiriman Berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali	100,000	0	98,000	0	98,000	98.00 %	2,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	350,000	0	350,000	0	350,000	100.00	0
000016. Pemberitahuan Proses Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Jaksa/Terdakwa/Penasihat Hukum	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
000017. Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	24,000,000	0	22,400,000	1,600,000	24,000,000	100.00	0
QBA.032 Pos Bantuan Hukum	24,000,000	0	22,400,000	1,600,000	24,000,000	100.00	0
051 Pos Bantuan Hukum	24,000,000	0	22,400,000	1,600,000	24,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 *SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Satuan Kerja : 400303 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Hal 3 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				% SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Inti	s.d. Periode		
051.0A Pos Bantuan Hukum	24,000,000	0	22,400,000	1,600,000	24,000,000	100.00	0
522131 Belanja Jasa Konsultan	24,000,000	0	22,400,000	1,600,000	24,000,000	100.00	0
000018. Honor Advokat / Pengacara Piket	24,000,000	0	22,400,000	1,600,000	24,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

BAB IV

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Dari seluruh indikator pada Sasaran Strategis ini berikut adalah permasalahan dan upaya pemecahan masalah.

Permasalahan :

- Terdapat tantangan dalam melakukan kegiatan eksekusi putusan pengadilan untuk perkara perdata gugatan, khususnya dalam hal pengamanan hakim dan aparatur pengadilan lainnya.

Upaya Pemecahan Masalah :

- Dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum lainnya seperti kepolisian untuk meminta bantuan pengamanan dalam membantu melaksanakan eksekusi putusan pengadilan.

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Dari seluruh indikator pada sasaran strategis ini berikut adalah permasalahan dan upaya pemecahan masalah.

Permasalahan :

- Penyelesaian perkara anak melalui diversi yang masih sulit untuk dilakukan.

Upaya Pemecahan Masalah :

- Mendorong hakim untuk mengikuti diklat/pelatihan atau sertifikasi terkait penyelesaian perkara anak melalui diversi.

Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Dari seluruh indikator pada sasaran strategis ini berikut adalah permasalahan dan upaya pemecahan masalah.

Permasalahan :

- Penyelesaian perkara perdata melalui mediasi masih sulit untuk dilakukan.

Upaya Pemecahan Masalah :

- Mendorong Hakim untuk mengikuti diklat/pelatihan atau sertifikasi terkait penyelesaian perkara perdata melalui mediasi.
- Melakukan Monev Mediator untuk memantau kinerja Mediator dalam penyelesaian perkara melalui mediasi.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Dari seluruh indikator pada sasaran strategis ini berikut adalah permasalahan dan upaya pemecahan masalah.

Permasalahan :

- Tidak tersedianya anggaran untuk melakukan kegiatan perkara prodeo dan sidang di luar gedung pengadilan.

Upaya Pemecahan Masalah :

- Melakukan permintaan anggaran untuk kegiatan prodeo dan sidang di luar gedung pengadilan untuk tahun anggaran 2024.

BAB V

PENUTUP

Laporan Interim Penilaian Kinerja Triwulan IV Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2022 ini merupakan salah satu alat monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja di tahun berjalan, kendati sebagian besar target dari indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2022 sebagian besar belum dapat diukur secara valid dikarenakan ada beberapa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan sehingga membuat beberapa indikator pada sasaran strategis sulit untuk direalisasikan.

Mengingat upaya pencapaian kinerja merupakan ikhtiar yang berkesinambungan maka pemantauan per triwulan tetap relevan dilakukan demi tercapainya kinerja yang diharapkan di akhir tahun.

Demikian Laporan Kinerja Interim Triwulan IV disusun, diharapkan mampu memberikan manfaat sebagaimana mestinya.

Tanah Grogot, 24 Januari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot



MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H.
NIP. 197602072001121004